

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan suatu usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang memiliki skala ekonomi yang lebih kecil atau terbatas. Namun UMKM menjadi salah satu roda perekonomian yang ada dalam masyarakat yang memberikan dampak atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang berdiri sendiri, sehingga bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, baik itu dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari perusahaan yang lebih besar atau perusahaan lainnya.

2.1.2 Kriteria UMKM

UMKM terdiri dari tiga kelompok atau golongan usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha/kekayaan bersih dan omset penjualan tahunan. Karakteristik setiap UMKM dikelompokkan berdasarkan modal usaha dan omset tahunannya. Kriteria penggolongan UMKM tersebut dijabarkan dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha mikro apabila kekayaan bersih yang dimiliki suatu usaha paling banyak (maksimal) Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), yang di mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki penjualan tahunan atau omset tahunannya maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha kecil apabila mempunyai kekayaan bersih paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang di mana kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki jumlah hasil penjualan tahunan atau omset tahunan minimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha menengah apabila memiliki jumlah kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang di mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki jumlah hasil penjualan tahunan atau omset tahunan minimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu, kriteria setiap UMKM juga dijelaskan dalam Pasal 35 PP No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sebagai berikut:

A. Usaha Mikro

Usaha mikro untuk usaha dengan modal usaha paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta omset penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Usaha Kecil

Usaha kecil untuk usaha dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta omset penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

C. Usaha Menengah

Usaha kecil untuk usaha dengan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta omset penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2 Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018), akuntansi merupakan suatu aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menyajikan suatu informasi yang relevan untuk para *steckholder*. Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnisnya, mencatat aktivitas tersebut untuk memberikan riwayat aktivitas keuangannya, dan mengkomunikasikan informasi yang telah dikumpulkan kepada para pengguna berupa laporan akuntansi.(Weygandt et al., 2018)

Berdasarkan Modul dasar (CAFB) Akuntansi dasar yang diterbitkan oleh IAI, Akuntansi merupakan suatu ilmu yang mempelajari terkait proses pencatatan, menganalisis dan mengkomunikasikan suatu transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan menghasilkan suatu laporan terkait suatu informasi yang relevan bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan bagi para *steckholder*, baik itu pihak internal maupun eksternal (IAI, 2019).

Informasi yang dilaporkan berupa informasi terkait unsur keuangan suatu entitas bisnis yang dapat digunakan oleh para *steckholder* dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, informasi tersebut harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh para *steckholder* tersebut, baik dalam segi waktu, tempat, dan tujuannya.

Pihak internal yang menjadi *steckholder* dapat berupa manajer atau direktur, dan pemilik usaha. Sedangkan untuk pihak eksternal dapat berupa, supplier, pelanggan, penyedia jasa keuangan, pemerintah, publik dll.

2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan

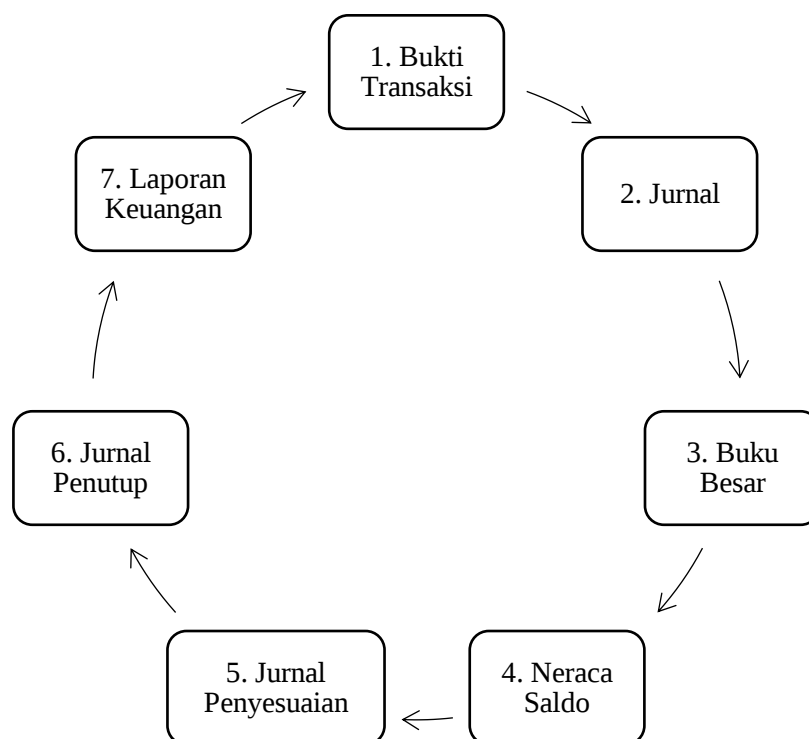
Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang disajikan secara terstruktur terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang diperoleh dari hasil pencatatan atas transaksi ekonomi suatu entitas. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas bisnis yang nantinya akan digunakan oleh para steckholder dalam mengambil suatu keputusan ekonomi atau dalam melakukan analisis bisnis atas entitas pemilik laporan keuangan. Laporan keuangan juga sebagai wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan laba rugi (*Income Statement*) menyajikan pendapatan dan beban dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih untuk periode waktu tertentu.
2. Laporan ekuitas pemilik (*Owner's equity Statement*) merangkum perubahan ekuitas pemilik untuk periode waktu tertentu.
3. Laporan Posisi keuangan (*Balance sheet*) atau Neraca melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.
4. Laporan arus kas (*Statement of Cash flow*) merangkum informasi tentang arus kas masuk (penerimaan) dan arus keluar (pembayaran) untuk periode waktu tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) melaporkan terkait catatan tambahan, skedul tambahan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan atau informasi tambahan yang mendukung atau memperjelas isi dari ke laporan lainnya agar lebih informatif dan bermanfaat bagi para pengguna laporan.

2.2.3 Siklus Penyusunan Laporan Keuangan

Siklus akuntansi atau penyusunan laporan keuangan merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk menyusun atau menyajikan laporan keuangan mulai dari tahap identifikasi transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Menurut Hakim & Rosini (2018) penyelesaian siklus akuntansi menjadi sesuatu yang penting dalam sistem informasi akuntansi karena laporan keuangan yang dihasilkan melalui siklus akuntansi adalah informasi yang paling konkret dan absah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara umum. Berikut contoh gambaran siklus akuntansi UMKM.

Gambar II.1 Siklus Akuntansi UMKM



Sumber: Ulfah (2016)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa siklus akuntansi UMKM terdiri dari 7 siklus yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Bukti transaksi merupakan dokumen yang berisi rekaman atau pengesahan yang menjadi sumber pencatatan atau proses penjurnal setiap transaksi.
- b. Jurnal merupakan proses pencatatan atau perekaman setiap transaksi keuangan yang berisi jenis akun terkait, tanggal transaksi, dan nilai nominal transaksi.
- c. Posting ke buku besar dilakukan secara berkala, transaksi yang dicatat dalam jurnal diposting ke akun-akun di buku besar. Debit dan kredit untuk setiap entri jurnal diposting ke akun dalam urutan di mana mereka terjadi dalam jurnal
- d. Membuat neraca saldo yang berisi saldo akhir setiap akun yang ada dalam buku besar dan mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit, penyusunan neraca saldo biasanya dilakukan setiap akhir periode pelaporan atau periode akuntansi.
- e. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo.
- f. Membuat ayat-ayat penutup yaitu menjurnal dan memindahbukukan ayat-ayat penutup atau untuk menutup saldo akun temporer (akun sementara).
- g. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

2.3 SAK EMKM

2.3.1 Gambaran Umum SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan suatu standar pelaporan keuangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam rangka membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya. Penerbitan dan pengesahan SAK EMKM merupakan salah

satu bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

SAK EMKM disahkan pada 24 Oktober 2016 dan efektif berlaku mulai 01 Januari 2018. Oleh karena itu, sejak tahun 2009 sampai dengan berlakunya SAK EMKM, UMKM menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai dasar penyusunan dan pelaporan keuangan. Namun karena seiring perkembangannya dan dengan keterbatasan sumber daya manusia, UMKM membutuhkan standar akuntansi yang lebih sederhana. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dirancang lebih sederhana dari SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM. Menggunakan biaya historis secara murni sebagai dasar pengukuran sehingga pencatatan aset dan liabilitas hanya sebesar biaya perolehannya.

2.3.2 Kebijakan Akuntansi menurut SAK EMKM

Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM pada Bab 7 Paragraf 7.2 menjelaskan, bahwa kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Dalam SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ini maka entitas menggunakan acuan pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria, dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban serta prinsip perfasih yang terdapat dalam Bab 2 SAK EMMK. Berikut konsep dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penerapan SAK ini yang terdiri dari definisi dalam laporan posisi

keuangan & laporan kinerja keuangan, Pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan asumsi dasar yang digunakan.

2.3.2.1 Posisi keuangan dan Kinerja keuangan

a. Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan informasi saldo yang dimiliki oleh entitas yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dilaporkan dan disajikan dalam waktu tertentu. Ketiga unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1) Aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan mempunyai manfaat ekonomis yang akan diperoleh di masa yang akan datang oleh entitas. Manfaat ekonomis di masa depan suatu aset tersebut merupakan potensi aset tersebut untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas entitas yang dapat timbul atau diperoleh dari pemanfaatan atau pelepasan aset tersebut.

Berdasarkan wujudnya, aset dibedakan menjadi dua yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Walaupun wujud aset tidak esensial dalam menentukan keberadaan suatu aset.

- a) Aset berwujud merupakan aset yang memiliki wujud atau bentuk fisik seperti tanah, bangunan, peralatan, persediaan, dan segala hal yang memiliki nilai dan bentuk fisik.
- b) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya.

2) Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Karakteristik esensial dari kewajiban yaitu bahwa entitas memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi di masa yang akan datang atau saat ini untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Penyelesaian kewajiban tersebut dapat berupa atau melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset lain selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. selain itu, kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual yang dimiliki oleh entitas atas aset neto atau aset setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya modal, saham, laba ditahan dll.

b. Kinerja Keuangan

Dalam SAK EMK Bab 2 Paragraf 2.8 (2016), kinerja keuangan entitas merupakan informasi terkait penghasilan dan beban entitas selama periode tertentu, yang kemudian disajikan dalam laporan laba rugi. unsur dalam kinerja keuangan atau laporan laba rugi hanya terdiri dari penghasilan dan beban.

1) Penghasilan

Penghasilan (*income*) merupakan peningkatan manfaat ekonomik yang diperoleh entitas baik dari arus kas masuk atau peningkatan nilai aset, penurunan nilai liabilitas

2) Beban

Beban (*Expenses*) merupakan penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan nilai aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada pemilik/penanam modal.

2.3.2.2 Pengakuan dan Pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan

A. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan

Menurut SAK EMKM Bab 2 Paragraf 2.12, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Manfaat ekonomik masa depan → dapat dipastikan bahwa manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas
- ii. Keandalan pengukuran → terdapat biaya yang dapat diukur dengan andal.

Berikut kriteria pengakuan untuk unsur-unsur dalam laporan keuangan,

1) Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomik di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Jika manfaat ekonomik suatu aset dianggap tidak mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi, maka aset tersebut tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan melainkan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

2) Liabilitas

Pengakuan liabilitas dalam laporan posisi keuangan, apabila untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dibutuhkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dan jumlah yang harus dikeluarkan/diselesaikan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan

Pengakuan penghasilan dalam laporan laba rugi, jika terdapat kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan nilai aset atau penurunan liabilitas yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban

Pengakuan beban dalam laporan laba rugi, jika terdapat penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan nilai aset atau kenaikan liabilitas yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

B. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan

Menurut SAK EMKM pada Bab 2 Paragraf 2.15, pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban didalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan yang digunakan dalam SAK EMKM adalah menggunakan biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sejumlah besar kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan untuk biaya historis liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.3.2.3 Asumsi Dasar

Beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam SAK EMKM terdiri dari, sebagai berikut:

A. Dasar akrual

Menurut Oktaviana (Oktaviana, 2010), basis akrual merupakan konsep pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi tanpa mempertimbangkan arus kas yang terjadi pada saat bersamaan. Artinya suatu transaksi atau kejadian akan dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya dan memberikan pengaruh terhadap aset dan kewajiban entitas yang tidak hanya didasarkan pada arus kas/setara kas masuk dan keluar. Dalam SAK EMK Paragraf 2.19, entitas menggunakan dasar akrual dalam menyusun laporan keuangan, yang artinya unsur-unsur dalam laporan keuangan akan di akui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria masing-masing unsur tersebut.

B. Kelangsungan Usaha

Kelangsungan usaha (*Going concern*) merupakan asumsi yang digunakan oleh manajemen terhadap kepercayaan dan keyakinan bahwa dalam keadaan normal entitas/usaha diasumsikan akan beroperasi dalam kurung waktu yang tidak ditentukan, kecuali entitas mempunyai rencana likuidasi atau hal-hal lain yang menyebabkan entitas tidak akan bertahan lama. Dalam SAK EMKM Paragraf 2.20, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas dianggap mempunyai kelangsungan usaha, kecuali terdapat keinginan untuk likuidasi atau menghentikan operasi bisnis. Jika

entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

C. Konsep Entitas Bisnis

Menurut Cahyaningtyas et al. (2021), konsep entitas bisnis (*Business entity concept*) menilai suatu bisnis sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemilik, sehingga harta atau kekayaan bisnis merupakan kekayaan yang terpisah dari harta pemilik. Dalam SAK EMKM Paragraf 2.21, laporan keuangan disusun berdasarkan entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, maupun yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dari pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Setiap transaksi yang berkaitan dengan bisnis harus dipisahkan dari transaksi pemilik, atau entitas-entitas lainnya

2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan yang disajikan oleh entitas harus disajikan secara wajar dengan mensyaratkan penyajian yang jujur atas pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan setiap unsur-unsur dalam laporan keuangan. Sedangkan, ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas, maka diperlukan pengungkapan dalam CaLK. (SAK EMKM Paragraf 3.2). Laporan keuangan yang disajikan secara wajar harus memenuhi beberapa kriteria berikut,

- a. Relevan → informasi yang disajikan dapat digunakan oleh *user* dalam mengambil suatu keputusan
- b. Representasi tepat → informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu memberikan representasi yang tepat atau sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan → informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan, antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. dan antar entitas bisnis untuk melakukan evaluasi atas laporan posisi dan kinerja keuangan.
- d. Kesepahaman → informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan asumsi, pengguna memiliki pemahaman yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dengan ketekunan yang wajar.

laporan keuangan yang telah disajikan secara patuh dengan SAK EMKM harus dibuatkan pernyataan secara eksplisit tanpa pengecualian dalam CaLK. Kepatuhan terhadap SAK EMKM tidak dapat dideskripsikan oleh entitas, kecuali laporan keuangan tersebut telah mematuhi seluruh persyaratan dalam SAK EMKM itu sendiri.

Laporan keuangan disajikan secara lengkap setiap periode pelaporan dengan informasi komparatif (informasi untuk satu periode sebelumnya dengan seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan berjalan). Serta untuk penyajian dan klasifikasi setiap pos dalam laporan keuangan harus disusun secara

konsisten antar periode, kecuali terdapat perubahan kebijakan akuntansi atau disyaratkan dalam SAK EMKM untuk perubahan penyajian.

2.3.4 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM Paragraf 3.9, laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas minimum menyajikan, laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan (Laba Rugi), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut SAK EMKM Paragraf 3.10, laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK EMKM, selain ketiga laporan keuangan tersebut, entitas juga harus menyajikan informasi komparatif yang berisi penyajian minimum dua periode setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan CaLK yang terkait.

2.3.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Menurut IAI dalam CAFB Modul akuntansi keuangan (2018), laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan daftar posisi keuangan entitas dalam periode waktu tertentu, yaitu terkait komposisi jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu. Laporan posisi keuangan harus menunjukkan jumlah aset yang seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. karena aset merupakan jumlah sumber daya yang diinvestasikan pada suatu entitas, sedangkan liabilitas dan ekuitas merupakan sumber investasi atau pendanaan atas aset tersebut. Ekuitas merupakan sumber pendanaan yang menunjukkan kepemilikan pemodal atau investor yang bersangkutan. Sedangkan liabilitas merupakan sumber pendaan yang berasal dari pihak ketiga yang harus dibayar baik dalam bentuk kas/setara kas, atau barang/jasa.

Dalam SAK EMKM Bab 4 dijelaskan terkait laporan posisi keuangan. dalam laporan posisi keuangan yang disajikan oleh entitas secara umum mencakup pos-pos berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Kas dan setara kas; | - Utang usaha; |
| - Piutang; | - Utang bank; |
| - Persediaan; | - Ekuitas. |
| - Aset tetap; | |

Dalam SAK EMKM tidak secara khusus menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan, namun entitas dapat menyajikan pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. Klasifikasi aset yang disajikan dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset yang disajikan/diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar. Berikut kriteria untuk aset lancar,

- Perkiraan realisasi atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu siklus operasional normal entitas.
- Dimiliki untuk diperdagangkan.
- Diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- Kas dan setara kas, kecuali yang dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan.

Klasifikasi liabilitas, dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu jatuh temponya yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas

jangka panjang merupakan semua liabilitas lainnya yang tidak memenuhi kriteria jangka pendek. Berikut kriteria liabilitas jangka pendek,

- Akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi (12 bulan).
- Dimiliki untuk diperdagangkan.
- Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2.3.4.2 Laporan Laba Rugi

Menurut IAI dalam CAFB Modul akuntansi keuangan (2015), laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh entitas, dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kinerja keuangan entitas selama periode tertentu, yaitu laba rugi, komposisi, dan rincian penghasilan yang terdiri dari pendapatan dan keuntungan, beban, dan penghasilan komprehensif lain dengan tujuan untuk menghitung atau menganalisis probabilitas, efisiensi usaha. Perhitungan laba rugi sangat bergantung terhadap waktu dan cara pengakuan dari komponen laporan laba rugi yaitu pendapatan (*revenue*) atau keuntungan (*gain*), serta beban (*expense*).

Dalam SAK EMKM laporan laba rugi di dibahas dalam satu bab khusus yaitu pada Bab 5 yang mencakup definisi dan komponen yang disajikan dalam laporan laba rugi. Menurut SAK EMKM Paragraf 5.1 – 5.4, laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh

entitas, yang merupakan laporan terkait kinerja keuangan entitas untuk satu periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi terdiri dari

- a) Pendapatan
- b) Beban Keuangan
- c) Beban Pajak

Selain itu, juga disajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi harus memuat seluruh informasi terkait penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode pelaporan. SAK EMKM juga mengatur terkait perlakuan atas dampak dari koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian restropektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (untuk lebih lanjut terkait hal tersebut dijelaskan dalam Bab 7 SAK EMKM).

2.3.4.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam SAK EMKM penjelasan terkait CaLK dijelaskan dalam Bab 6 yang mencakup terkait prinsip yang menjadi dasar suatu informasi disajikan dalam CaLK dan cara penyajiannya. Menurut SAK EMKM Bab 6, bahwa informasi yang disajikan dalam CaLK terdiri dari:

- a) Suatu pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi.

- c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material dan bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Terkait jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan dalam CaLK sangat bergantung terhadap jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Proses penyajian CaLK dilakukan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang informasi ke informasi terkait dalam CaLK.